KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dua Fraksi DPR Ngebet Hapus Banggar & BURT
Tanggal : Senin, 09 Juni 2014
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dua Fraksi DPR Ngebet Hapus Banggar & BURT

WACANA penghapusan Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terus mendapatkan dukungan. Fraksi Hanura dan Fraksi PPP mendukung usulan penghapusan dua alat kelengkapan Dewan tersebut.

Salah satu usulan yang dibahas pada revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) adalah penghapusan dua alat kelengkapan dewan. Banggar dan BURT. Usulan itu pertama kali dilemparkan Fraksi Golkar.

Anggota DPR Fraksi Hanura, Murady Darmansjah menyambut baik gagasan penghapusan Banggar dan BURT DPR. Dia mengaku sejak dulu memang mewacanakan agar Banggar dan BURT dihapus.

"DPR itu kerjanya masak memeriksa pekerjaan yang dilakukan Dirjen (direktur jenderal). Banggar itu terlalu sibuk bila harus memeriksa satu-persatu anggaran diajukan pemerintah. Kita tinggal setuju atau tidak setuju saja," ujarnya kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Lagipula, dua alat kelengkapan Dewan itu, kata Murady, merupakan sasaran tembak dari para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengkritik kerja DPR. Tidak heran, sambung dia, karena kedua alat kelengkapan DPR itu, dan kerap mendapat kritikan, membuat citra DPR rusak.

"Kalau alasannya untuk memperkuat parlemen, saya pikir Banggar dan BURT perlu dipikirkan untuk dievaluasi keberadaannya," tegas anggota Komisi IV DPR ini.

Politisi PPP Ahmad Yani juga setuju dengan penghapusan kedua alat kelengkapan DPR tersebut. Dia menjelaskan, usulan penghapusan Banggar dan BURT sudah masuk dalam draf revisi yang sedang dibahas. Dengan begitu, sebut Yani, penghapusan Banggar bukan lagi sebatas wacana, tapi sudah menjadi rencana yang akan diambil.

"Dalam fungsi anggaran, ada usulan enggak perlu ada Banggar permanen. Banggar yang ada tidak lagi seperti Banggar sekarang," kata Yani kepada wartawan kemarin.

Wakil Ketua Pansus RUU MD3 ini mengatakan, setelah Banggar dibubarkan, pembahasan anggaran akan difokuskan di tingkat komisi. Kalaupun ada pembahasan di luar komisi, maka akan dibentuk organ lain yang sifatnya ad hoc.

"Di draf (RUU MD3) usulan tersebut sudah ada sejak awal," tandasnya.

Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan pembubaran Banggar dan BURT dalam revisi UU MD3 dari alat kelengkapan DPR. Penghapusan kedua alat kelangkapan DPR itu untuk mengikis kecurigaan masyarakat yang kerap mencap buruk lembaga wakil rakyat ini.

Selanjutnya, Banggar dan akan digantikan oleh lembaga tersendiri di bawah Kesekjenan DPR. Lembaga baru tersebut bertugas membahas anggaran sama persis seperti yang dilakukan Banggar selama ini.

Namun lembaga tersebut, tidak bisa menyetujui anggaran yang akan disahkan. Pengesahan anggaran tetap diambil oleh anggota DPR.

Begitupun dengan BURT. Keberadaan BURT dianggap hampir sama kewenangannya dengan Setjen DPR, sehingga menimbulkan persepsi kurang baik dari masyarakat. Penghapusan bertujuan untuk menghindari *abuse of power* dan kecurigaan masyarakat. ■ SIS/QAR